



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTADI PRASETYO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
3. NHK : 209490

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/78 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000		
2. Tanah Seluas 590 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 108.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	290.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
2. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	794.550.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	794.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **17 Juli 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.